



KEMENTERIAN
PERTANIAN

**Orasi Pengukuhan Profesor Riset
Bidang Ekonomi Pertanian**



LIPI

REFORMASI KEBIJAKAN HARGA PRODUSEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAYA SAING BERAS



**Oleh:
Dr. Mohamad Husein Sawit, M.Sc**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Bogor, 21 Juni 2010**

633.18

BK 017 663

SAW

r



KEMENTERIAN
PERTANIAN

Orasi Pengukuhan Profesor Riset
Bidang Ekonomi Pertanian



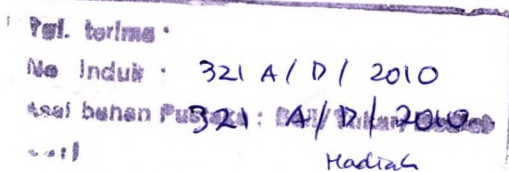
LIPI



REFORMASI KEBIJAKAN HARGA PRODUSEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAYA SAING BERAS

Oleh:

Dr. Mohamad Husein Sawit, M.Sc



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Bogor, 21 Juni 2010

© Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2010

ISBN 978-979-3566-82-5

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya terhadap

Daya Saing Beras/Sawit, M.H.

ii+56 hlm; 14,5 x 20,2 cm

ISBN 978-979-3566-82-5

1. Kebijakan harga 2. Gabah dan beras 3. Daya saing

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jln. Ragunan 29 Pasarmingu, Jakarta Selatan

Telp. : 021-7806202

Faks. : 021-7800644

E-mail : kabadan@litbang.deptan.go.id



321 A / p / 2010

RIWAYAT HIDUP



Mohamad Husein Sawit, lahir di Sigli, Propinsi Aceh, 25 Nopember 1947. **Ahli Peneliti Utama** bidang Sosial Ekonomi Pertanian dan Kebijakan Pertanian, sejak 1 Juni 2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.75/M tahun 2006. **Riwayat Pendidikan:** Sarjana Ekonomi (drs), spesialisasi Ekonomi Pertanian, Fakultas Ekonomi UGM (1974); MSc. dalam bidang *Agricultural Development Economics*, Australian National University, Canberra, Australia

(1983); PhD dalam bidang *Economics*, University of Wollongong, NSW Australia (1994). **Pendidikan Non-Gelar:** Analisis *Rural Labour Market* di World Bank, Washington DC, AS (1985); Latihan dalam bidang *Watershed Analysis and Resouce Management* Cornell University, Ithaca AS (1994). **Riwayat Pekerjaan:** Kepala Sub-Bidang Monitoring (1984-1988) dan Kepala Sub-Bidang Rencana Kerja (1994-1995) di Puslit Agro Ekonomi, Badan Litbang Deptan; Tenaga Ahli Kepala BULOG dalam bidang Kebijakan Pangan dan Makro-ekonomi (1995-1999); Staf Ahli Menteri Pangan dan Hortikultura dalam bidang Pemasaran Pangan (1999-2000); Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga BULOG (2000-2003). **Karya Ilmiah:** Menulis sebanyak 91 karya ilmiah yang dipublikasi dalam bentuk buku, artikel di berbagai jurnal ilmiah, 14 di antaranya dalam bahasa Inggris; lima buku masing-masing terbit di UI, IPB, Puslitbang Bulog, UNDP/Bappenas, dan Pusat Sosek dan Kebijakan Pertanian; Ketua/anggota editor (3 buku) dan editor

prosiding (6 terbitan) diterbitkan oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi. **Pembinaan Kader Ilmiah:** Sejak 1998 aktif membimbing dan menguji mahasiswa S3 di IPB, UNPAD, dan UGM. Mengajar di Fakultas Ekonomi UIK Bogor (1976-82) dan Program MM di STIE, Budi Luhur (2000-2003). Senior Research Fellow di Kyoto University, Jepang (2002). **Organisasi Profesi:** Pengurus daerah/pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia sejak 1989, pengurus inti Yayasan Agro Ekonomika sejak 2003; pengurus pusat Masyarakat Agribisnis Indonesia, dan Dewan Beras Nasional sejak 2007. **Penghargaan:** Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada 1999.

PRAKATA PENGUKUHAN

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Puji syukur *alhamdulillah* kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan orasi pengukuhan Profesor Riset bidang Ekonomi Pertanian dengan judul:

REFORMASI KEBIJAKAN HARGA PRODUSEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAYA SAING BERAS

Orasi ini terdiri atas tujuh bab, yaitu:

- I. Pendahuluan.
- II. Kebijakan Harga untuk Petani dan Peran Pengadaan BULOG
- III. Kebijakan Harga dan Hambatan Pengembangan Industri Beras.
- IV. Liberalisasi Perdagangan Beras.
- V. Arah dan Formulasi Kebijakan Harga ke Depan.
- VI. Kesimpulan, Saran, dan Implikasi.
- VII. Penutup.

I. PENDAHULUAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Kebijakan harga melalui jaminan harga dasar dapat memperkecil risiko dalam berusahatani, karena petani terlindungi dari kejatuhan harga jual gabah/beras di bawah ongkos produksi, yang sering terjadi dalam musim panen raya.^{1,2,3} Manakala risiko suatu usaha dapat ditekan sekecil mungkin, maka ketersediaan beras dari produksi dalam negeri lebih terjamin.⁴ Pasar beras internasional masih mencirikan pasar tipis (*thin market*) dan pasar sisa (*residual market*),^{5,6} sehingga ketersediaan beras dari produksi dalam negeri menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat ketahanan pangan.⁴

Kebijakan harga gabah atau beras untuk produsen dapat terlaksana karena adanya pengadaan, dalam hal ini BULOG sebagai lembaga pengesekusi. Pengadaan gabah/beras dapat terealisasi karena adanya mekanisme penyalurannya. Penyaluran beras pengadaan tersebut akan terhambat apabila kualitas gabah/beras tetap rendah.^{4,7,8,9} Kualitas gabah dan beras adalah salah satu kunci daya saing industri padi dan beras nasional.¹⁰ Oleh karena itu, kebijakan harga dan insentif pendukung lainnya perlu dirancang untuk saling memperkuat keterkaitan tersebut, sehingga mampu memperkuat industri primer (padi) dan industri sekunder (beras).^{11,12}

Dalam dua puluh tahun terakhir telah tersedia berbagai teknologi panen, pasca panen, dan penggilingan padi yang mampu meningkatkan efisiensi, dan kualitas gabah/beras, namun terkendala dalam penerapannya, karena rendahnya insentif yang diperoleh petani dan pelaku usaha. Teknologi padat karya pada umumnya masih diadopsi petani meskipun upah buruh terus meningkat. Unit penggilingan padi

skala kecil masih mendominasi industri pengolahan gabah. Indonesia jauh tertinggal dalam penerapan teknologi panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan padi dibandingkan dengan beberapa negara produsen padi di Asia, seperti Vietnam, Thailand, dan Cina.^{1,13,14,15,16}

Kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) kini sedang berada di persimpangan jalan, dengan pengertian apakah akan mereformasi kebijakan harga untuk menghadapi tantangan baru di era liberalisasi? Atau, apakah pemerintah akan tetap mempertahankan HPP kualitas tunggal, yaitu beras kualitas medium yang telah diterapkan selama 41 tahun terakhir, pada: (i) era swasembada/surplus produksi; (ii) era tuntutan peningkatan jumlah serta perbaikan kualitas gabah/beras pengadaan dalam negeri dan stok publik Cadangan Beras Pemerintah; (iii) era pengadaan BULOG dinaikkan dari 6-7% menjadi 8-10% terhadap total produksi beras nasional; dan (iv) era persaingan bebas untuk komoditas beras di kawasan ASEAN FTA.

Dengan latar belakang inilah fokus utama materi orasi ini disusun untuk mendukung kebijakan baru tentang HPP, strategi pengadaan gabah/beras BULOG, dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP).

II. KEBIJAKAN HARGA UNTUK PETANI DAN PERAN PENGADAAN BULOG

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Kebijakan harga dan non-harga buat komoditas pangan telah lama dikenal dalam literatur ekonomi pertanian. Namun, kebijakan harga bagi kepentingan petani padi dan beras pertama sekali diperkenalkan

di Indonesia pada tahun 1969. Sejak itu, kebijakan harga dan non-harga dilaksanakan secara bersamaan, sehingga Indonesia mampu meningkatkan produksi gabah yang tinggi.^{8,17,18}

Pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi melalui program BIMAS (Bimbingan Massal) pada pertengahan 1960an. Pada awalnya, pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi melalui kebijakan non-harga, seperti memperkenalkan varietas unggul padi, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, perbaikan pengairan, dan perbaikan teknik pertanian. Namun kebijakan non-harga saja ternyata belum cukup ampuh untuk mendorong petani meningkatkan produksi, karena harga gabah/beras yang diterima petani seringkali di bawah biaya produksi.^{2,8,18,19}

Dukungan pemerintah terhadap kebijakan harga berbeda antara di era reformasi dengan era ORBA, terutama terkait dengan desentralisasi, peran teknokrat yang sangat rendah dan sebaliknya politisi, seperti yang dibahas berikut ini.

2.1. Kebijakan Harga di Era Pemerintahan ORBA

Pada era orde baru (ORBA), pemerintah menetapkan harga gabah dan beras dengan instrumen harga dasar. Pemerintah melalui BULOG melakukan pengadaan gabah dan beras, yang pada tahun-tahun tertentu seperti yang terjadi pada era swasembada pertengahan 1980an, melebihi jumlah penyaluran untuk menjaga harga gabah dan beras tidak jatuh di bawah harga dasar.

Penetapan harga dasar ditentukan oleh berbagai variabel dan formula. Formula yang dipakai untuk itu berubah dari waktu ke waktu. Awalnya harga dasar mengacu pada rumus tani, yaitu harga per kg gabah kering simpan (GKS) sama dengan harga per kg urea.

Sejak awal tahun 1990an, harga dasar ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi, tingkat inflasi, dan harga beras di pasar internasional. Harga beras luar negeri dipakai sebagai patokan biaya oportunitas dan efisiensi pada industri beras nasional.^{10,20,21,22,23}

Kebijakan harga yang tepat, diimbangi oleh pengeluaran publik yang tinggi untuk irigasi, riset dan penyuluhan, didukung oleh ketepatan kebijakan moneter dan fiskal telah membuat Indonesia mampu berswasembada beras pada 1984. Namun, sejak akhir 1980an sampai pertengahan 1990an terjadi pelandaian produksi beras. Indonesia terpaksa harus mengimpor beras yang terus meningkat seiring dengan peningkatan permintaan dalam negeri.

2.2. Kebijakan Harga Era Pemerintahan Reformasi

Pemerintah di era reformasi menata ulang kebijakan harga yang terabaikan dalam periode 1997-2000. Pada waktu itu, pemerintah terpaksa menempuh liberalisasi pasar beras yang radikal, karena “tekanan” lembaga donor.²⁴ Pada akhir tahun 2001, pemerintah berhasil menata ulang kebijakan perberasan nasional.

Perubahan harga dari harga dasar (HD) menjadi harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) tertuang dalam diktum ketiga Inpres No. 9/2001 tentang penetapan kebijakan perberasan dan berlaku sejak 1 Januari 2002. Inpres perberasan di era reformasi lebih komprehensif, mencakup kebijakan harga dan non-harga, kebijakan perdagangan, stok publik, serta subsidi beras terarah (*targeted*).^{8,12} Inpres kebijakan perberasan tersebut diperbaharui hampir setiap tahun. Sejak 2005, istilah HDPP diganti menjadi harga pembelian pemerintah (HPP).

Biaya dalam pelaksanaan kebijakan HPP relatif lebih murah dibandingkan dengan kebijakan harga dasar, karena pemerintah hanya

membeli beras dan gabah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan penyaluran.^{8,25} Kebijakan ini semakin umum dipraktekkan di negara produsen utama beras, seperti Thailand dan Cina.

Dalam enam tahun terakhir, penetapan HPP tidak lagi merujuk kepada harga beras internasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh ongkos produksi.¹⁰ Biaya produksi gabah terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga sarana produksi, BBM (bahan bakar minyak), dan upah tenaga kerja. Harga pembelian beras pemerintah (kualitas medium FOB Jakarta) pada 2009 misalnya, ditetapkan lebih tinggi (\$ 508/ton) dibandingkan dengan harga beras internasional dengan kualitas yang sama, yaitu \$ 384/ton (FOB Vietnam 25%). Pada tahun 2010, pemerintah kembali menaikkan HPP sebesar 10% yang makin mendorong penurunan daya saing beras berkualitas medium yang dihasilkan Indonesia.^{10,26}

Sejak 2007, kebijakan harga dan subsidi pupuk mendapat dukungan politik yang kuat dari DPR. Di pihak lain, dana publik/APBN yang dialokasikan untuk perbaikan irigasi, perbaikan kualitas lahan, riset dan penyuluhan, serta penerapan teknologi panen/pascapanen diprioritaskan rendah.^{27,28,29} Walaupun produksi gabah naik cukup tinggi (5,4%/tahun) dalam periode 2007-2009, tetapi sumber pertumbuhan produksi berasal dari kenaikan luas panen (2,9%/tahun), sisanya dari kenaikan produktivitas (2,5%/tahun). Dominasi kebijakan harga dan subsidi pupuk ternyata belum cukup ampuh memecahkan kendala dari sisi suplai beras nasional (*supply constraints*).

2.3. Harga Gabah dan Pengadaan BULOG

Harga gabah di tingkat produsen dan pengadaan BULOG berkorelasi positif, yaitu 0,547 pada musim panen gadu, 0,358 pada musim panen paceklik, dan 0,018 pada musim panen raya. Harga

gabah ditentukan oleh musim panen padi, yaitu rendah pada musim panen raya dan tinggi di musim paceklik. Volume pengadaan gabah/beras BULOG juga berkaitan erat dengan musim panen dan harga gabah/beras di pasar.^{9,30,31}

2.3.1. Pola Pergerakan Harga Gabah Menurut Musim

Pola panen padi mengikuti pola musiman, dapat dibagi ke dalam tiga periode yaitu musim panen raya, musim panen gadu dan musim panen paceklik.^{9,30,31} Musim panen raya berlangsung selama periode Februari-Mei dengan rata-rata luas panen 51% dari 11,8 juta ha areal rata-rata panen dalam periode 2003-2007. Masa panen berikutnya adalah musim panen gadu (Juni-September) yang mengambil porsi 33%, dan sisanya 16% berlangsung pada periode musim panen paceklik (Oktober-Januari).³⁰ Pada tingkat nasional, walau pada musim paceklik sebagian kecil petani masih melakukan panen padi, karena di antara mereka tidak terkendala dengan ketersediaan air.

Harga gabah merosot rendah pada periode musim panen raya dan meningkat setelahnya, dan kemudian melambung dengan harga paling tinggi pada periode musim panen paceklik.^{20,31} Rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dalam dua tahun terakhir (2008-2009) lebih tinggi 10% pada musim panen gadu dan 16% pada musim panen paceklik dibandingkan dengan musim panen raya.

Kualitas gabah/beras juga mengikuti musim panen. Kualitas gabah pada musim panen gadu dan musim panen paceklik jauh lebih baik dibandingkan dengan musim panen raya. Membaiknya kualitas gabah/beras dalam dua musim tersebut disebabkan oleh cukupnya sinar matahari, rendahnya serangan hama dan penyakit, sehingga kandungan butir hampa, butir hijau dan butir kapur rendah, dan pengeringan gabah

menjadi mudah, sehingga kandungan butir kuning rendah.³² Oleh karena itu, harga gabah/beras akan tinggi pada periode tersebut, mengikuti perkembangan kualitas gabah/beras dan tingkat produksi.²⁶

Ketika pemerintah menerapkan HPP untuk beras kualitas medium yang berlaku sepanjang tahun, maka kebijakan tersebut sebenarnya “melawan” pergerakan harga dan perbaikan kualitas. Disinilah letak kelemahan mendasar penerapan HPP kualitas medium yang berlaku sepanjang tahun.²⁶

2.3.2. Pola penyerapan Gabah/Beras oleh BULOG

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan HPP karena adanya BULOG sebagai lembaga pelaksananya. Lembaga BUMN ini membeli gabah/beras antara 2-3 juta ton/tahun atau 6-8% dari total produksi beras nasional. Pengadaan beras/gabah setara beras pada musim panen raya dapat mencapai 66%, musim panen gadu 30%, dan hanya 4% pada musim panen pakeklik.^{26,30}

Dalam pengadaan sebagian besar beras/gabah dalam negeri, BULOG bekerjasama dengan penggilingan padi swasta. BULOG mengelompokkan penggilingan padi swasta ke dalam empat tipe, yaitu A, B, C, dan D. Setiap kelompok menggambarkan alat/proses pengeringan padi, kapasitas giling, dan tempat atau cara penyimpanannya.³³ Kelompok tipe A adalah yang tertinggi dan tipe D terendah. BULOG tidak pernah bekerjasama dengan penggilingan padi tipe A karena mereka menghasilkan beras berkualitas premium atau super,¹⁰ tetapi BULOG membeli beras berkualitas medium.

Setiap tahun BULOG bekerjasama dengan 4.500 hingga 5.000 unit penggilingan padi skala kecil yang sebagian besar adalah penggilingan padi tipe D. Semakin banyak pengadaan BULOG pada kelompok C dan D, semakin tinggi permintaan terhadap beras berkualitas medium, dan semakin rendah insentif mereka untuk memperbaiki kualitas beras di luar kualitas medium. Diperkirakan 80% hasil penggilingan padi mereka ditampung oleh BULOG. Segmen pasar beras berkualitas medium terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya produksi dan volume pengadaan beras dalam negeri oleh BULOG. Inilah salah satu alasan mengapa pengusaha penggilingan skala kecil enggan berinvestasi pada penggilingan padi skala besar/modern.

Pada era swasembada/surplus produksi, penyerapan gabah/beras oleh BULOG didorong hingga mencapai 10% atau sekitar 4 juta ton setara beras. Penyerapan yang tinggi untuk beras berkualitas medium telah berdampak luas terhadap kualitas pengadaan BULOG dan kualitas cadangan beras pemerintah yaitu menurun.²⁶

Sejak terjadinya swasembada/surplus produksi beras periode 2008-2009, pemerintah terus mendorong peningkatan pengadaan BULOG dari rata-rata 1,8 juta ton beras pada periode 2003-2007 menjadi 3,4 juta ton pada periode 2008-2009, atau meningkat 1,6 juta ton/tahun. Peningkatan pengadaan dalam jumlah besar pada musim panen gadu dan musim panen paceklik secara teoritis sulit dilakukan, karena pada periode tersebut kualitas gabah/beras umumnya lebih baik dan harganya tinggi, lebih tinggi dari HPP.²⁶

III. KEBIJAKAN HARGA DAN HAMBATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERAS

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Industri padi adalah industri primer, yang terus didorong pengembangannya oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan harga dan non-harga. Namun di pihak lain, industri beras khususnya industri penggilingan padi belum kokoh dalam mendukung industri primer, karena minimnya sentuhan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang telah mempengaruhi kualitas, harga, dan daya saing beras Indonesia.

PERPADI³⁴ melaporkan bahwa jumlah penggilingan padi dewasa ini 109 ribu unit, didominasi oleh penggilingan padi skala sederhana dan kecil sebesar 95% dari total kapasitas giling. Sisanya 5% adalah pangsa penggilingan padi skala besar. Umumnya unit penggilingan padi skala sederhana dan kecil merupakan investasi pada akhir tahun 1960an sampai awal tahun 1980an. Pada waktu itu, pemerintah membatasi perkembangan unit penggilingan padi skala besar agar unit penggilingan padi skala kecil yang umumnya dimiliki oleh swasta pribumi mampu bersaing dalam struktur pasar gabah/beras yang oligopoli.¹⁹

Rendemen giling gabah di Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan dengan rendemen giling gabah di beberapa negara produsen padi di Asia. Rendemen giling gabah kering giling di Cina 70%, Thailand 69,1%, sementara di India, Bangladesh, dan Vietnam masing-masing 66,6%, sedangkan di Indonesia 62,7%. Rendemen giling dapat dipakai sebagai salah satu indikator daya saing industri perberasan nasional.

Kondisi teknologi unit penggilingan padi skala kecil yang sudah tua menjadi penyebab merosotnya kualitas beras, tingginya kehilangan hasil pada kegiatan penjemuran dan penggilingan.^{35,36,37,38} Investasi untuk pengembangan unit penggilingan padi baru/modern berjalan sangat lambat di Indonesia.^{1,26}

Perhatian pemerintah terhadap industri penggilingan padi amat minim. Skim kredit untuk keperluan tersebut dan kebijakan fiskal belum mendukung modernisasi industri penggilingan padi. Hal ini ditambah dengan penetapan HPP yang dinaikkan hampir setiap tahun, namun “ditekan rendah” bagi pelaku industri pengolahan. Pada tahun 2006, misalnya, HPP untuk gabah kering panen (GKP) naik 30%, sedangkan HPP gabah kering giling di tingkat penggilingan naik 27%, sedangkan kenaikan HPP beras 0%.

Rasio harga beras terhadap harga GKP yang ditetapkan pemerintah memperlihatkan hal yang sama. Rasio harga beras terhadap GKP pada tahun 2003 sebesar 227%, menurun menjadi 210% pada tahun 2005, merosot lagi menjadi 192% sejak tahun 2009. Semakin rendah rasio tersebut, semakin kurang berminat produsen untuk memperbaiki kualitas beras dan menerapkan teknologi baru.

Kenaikan yang tidak proporsional itu telah mengakibatkan sebagian industri penggilingan padi, terutama skala kecil, merugi. Majalah PADI³⁹ melaporkan 25-30% unit penggilingan padi tidak beroperasi, terutama yang berskala kecil/ sederhana, dan mereka adalah usaha kecil menengah (UKM).

Thahir⁴⁰ dalam naskah orasi pengukuhan profesor riset telah membahas perlunya program nasional untuk perbaikan rendemen beras guna mendukung keberlanjutan swasembada beras dan daya saing global. Setyono⁴¹ dalam naskah orasi profesor riset menganalisis pentingnya penerapan teknologi panen dan pasca-panen untuk

meningkatkan mutu gabah dan beras. Namun, perbaikan teknologi pasca-panen dan revitalisasi penggilingan padi tidak akan terealisasi, tanpa insentif yang memadai bagi petani dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mereformasi kebijakan HPP agar mampu memberikan insentif sehingga petani dan pelaku usaha penggilingan padi bersedia menerapkan teknologi baru. Hal itu menjadi penting dalam rangkaantisipasi liberalisasi perdagangan beras/gabah di masa mendatang.

IV. LIBERALISASI PERDAGANGAN BERAS

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Indonesia telah lama terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan produk pertanian dan non-pertanian di tingkat multilateral, regional, dan bilateral.^{42,43,44,45,46}

4.1. Perdagangan Multilateral

Indonesia ikut aktif dalam negosiasi di Putaran Doha WTO yang dimulai sejak akhir 2001 dan belum membuahkan kesepakatan hingga sekarang. Indonesia masuk dalam kelompok G-33, kelompok negara berkembang yang memperjuangkan sejumlah produk pertanian menjadi *special product* (SP), dan mengajukan perlindungan sementara melalui *special safeguard mechanism* (SSM).^{24,43}

Beras adalah salah satu komoditas pangan yang akan dimasukkan sebagai SP, sehingga tingkat liberalisasinya tidak terlalu besar dari yang telah diikat (*bound*) pada perundingan sebelumnya. Indonesia menuntut

mekanisme perlindungan yang efektif melalui SSM untuk beras dan sejumlah produk pertanian lainnya. Perlindungan khusus ini juga akan punya batas waktu seperti halnya SP.^{24,43}

4.2. ASEAN FTA (AFTA) dan ASEAN China FTA (ACFTA)

Indonesia juga ikut aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan regional, salah satu yang terpenting adalah AFTA. Negara ASEAN-6 telah berkomitmen dalam kerangka CEPT (*common effective preferential tariff scheme*) untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan menurunkan tarif impor semua produk ke tingkat 0-5% pada tahun 2010, kecuali beras dan produk yang masuk dalam kelompok *highly sensitive list*. Produk pada kelompok terakhir ini^{45,47} akan diliberalisasi paling lambat 1 Januari 2018.

Indonesia ikut pula dalam perjanjian ACFTA (*Asean China FTA*) yang tingkat liberalisasi dan produknya dibahas secara bilateral antara Indonesia dan Cina. Dalam kerja sama perdagangan ini, Indonesia telah menyepakati program penurunan tarif melalui tiga tahapan penjadwalan liberalisasi. Pada tahap III, tingkat tarif produk dalam kelompok *highly sensitive* menjadi 0-5% dan hambatan non-tarif akan dihapus. Beras⁴⁷ adalah salah satu produk yang akan diliberalisasi penuh, paling lambat pada tahun 2018.

Oleh karena itu, dalam beberapa tahun mendatang, produsen padi dan beras Indonesia akan langsung menghadapi persaingan dengan Vietnam, Thailand, Cina, Kamboja, dan Laos. Hal itu juga akan berdampak terhadap keberadaan lembaga parastatal atau Badan Layanan Umum (BLU) seperti BULOG di Indonesia, BERNAS di Malaysia, dan NFA di Filipina.

V. ARAH DAN FORMULASI KEBIJAKAN HARGA KE DEPAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

5.1. Arah dan Sasaran

Selain produktivitas, industri padi dan beras harus diperkuat dengan memprioritaskan pada peningkatan efisiensi melalui pengurangan kehilangan hasil pada tahap pemanenan, perontokan, pengeringan, dan penggilingan gabah.

Kebijakan harga dan non-harga bagi produsen perlu dipertahankan, namun prioritasnya diberikan pada non-harga guna mempercepat peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kebijakan harga perlu diubah dari kualitas tunggal atau medium ke multi-kualitas atau kualitas super dan premium, sehingga tercipta insentif untuk mendorong perbaikan kualitas gabah dan beras.

Pengadaan gabah/beras oleh BULOG juga diarahkan untuk mendorong perbaikan kualitas beras dan gabah, dengan mengimplementasikan kebijakan harga multi-kualitas. Lembaga BULOG harus diperankan dalam memecahkan kebuntuan investasi dalam industri penggilingan modern melalui pengadaan yang berbeda kualitas, dan penyaluran beras.

Selama lima tahun terakhir, beberapa anggota DPR/DPRD, pejabat Pemda, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pakar ekonomi pertanian mengusulkan agar pemerintah menerapkan HPP yang berbeda antar-wilayah. Kalau itu ditempuh maka tidak saja salah urus di lapangan akan lebih tinggi, tetapi juga pengamanan HPP akan

menjadi kurang efektif dan tidak mampu memecahkan persoalan perbaikan kualitas beras/gabah.²⁶

Pengalaman dari negara produsen di Asia memberikan keyakinan bahwa hampir tidak ditemui lagi penetapan harga dasar atau HPP dengan kualitas tunggal atau medium yang berlaku sepanjang tahun. Mereka menetapkan tingkat harga dasar atau HPP yang berbeda karena perbedaan kualitas beras, yaitu menurut butir patah, musim panen, dan varietas seperti yang dilaporkan oleh FAO.^{48,49}

5.2. Strategi Kebijakan Harga Beras ke Depan

Indonesia juga harus mengimplementasikan kebijakan harga multi-kualitas dengan kombinasi kriteria:

- (i) Perbedaan kualitas beras menurut butir patah, yaitu beras patah 5% atau 25%, tanpa butir menir.
- (ii) Perbedaan musim panen, yaitu musim hujan atau musim kemarau.
- (iii) Perbedaan varietas, yaitu varietas unggul atau varietas lokal/aromatik.

Tingkat HPP untuk butir patah 5%, dipanen pada musim kemarau, dan varietas lokal/aromatik ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan beras berkualitas medium.

Kualitas CBP (cadangan beras pemerintah) harus ditingkatkan secara bertahap dari kualitas medium menjadi kualitas premium/super dengan tahapan:

- (i) Pada tahun pertama, sepertiga jumlah CBP diisi oleh beras kualitas premium/super.
- (ii) Pada tahun ketiga, seluruh CBP telah terisi dengan beras kualitas premium/super.

VI. KESIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Kesimpulan, saran dan implikasi yang dapat ditarik dari orasi ilmiah ini adalah sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

Indonesia akan segera meliberalisasi perdagangan beras di kawasan AFTA dan ACFTA, sehingga peningkatan daya saing dalam industri padi dan beras menjadi sangat penting.

Kebijakan HPP dengan kualitas tunggal atau medium yang diterapkan selama 41 tahun berdampak negatif terhadap daya saing gabah/beras nasional, antara lain:

- (i) Kontra-produktif pada era swasembada/surplus produksi beras, pengadaan dalam negeri oleh BULOG dan volume cadangan beras pemerintah (CBP) terus ditingkatkan, karena beras berkualitas medium hanya dapat disimpan dalam jangka waktu lebih singkat dengan biaya perawatan stok yang lebih tinggi, dan sulit disalurkan.
- (ii) Menghambat perbaikan kualitas beras yang dihasilkan oleh unit penggilingan padi skala kecil yang jumlahnya dominan, dan sebagian besar hasil penggilingannya disalurkan ke BULOG, karena besarnya segmen pasar untuk industri kecil ini.
- (iii) Menjadi salah satu kendala dalam modernisasi industri penggilingan skala kecil dan perluasan adopsi *dryers*, sehingga sulit mengurangi susut hasil dan meningkatkan rendemen giling.

Tekanan politik kepada pemerintah semakin besar pada saat subsidi masukan (*input*) untuk tanaman padi dikurangi, dan pemerintah didorong untuk menaikkan HPP.

Sejak 2004, kenaikan HPP lebih banyak ditentukan oleh biaya produksi, tidak lagi mengacu pada perbandingan harga beras internasional.

Negara-negara produsen beras di Asia tidak menganut kebijakan harga dasar atau HPP tunggal. Pengalaman dari negara lain di Asia menunjukkan bahwa tingkat harga dasar atau HPP diberlakukan berbeda karena perbedaan kualitas beras menurut butir patah, musim panen, varietas, atau kombinasi di antaranya.

6.2. Saran

Pemerintah perlu segera mengoreksi kebijakan HPP beras dari kualitas tunggal atau medium menjadi multi-kualitas.

Penerapan HPP sebaiknya juga mengacu pada harga internasional, sehingga Indonesia lebih mampu berkompetisi di pasar global.

Pengadaan beras oleh BULOG juga perlu mengikuti pengadaan beras multi-kualitas. Beras berkualitas medium tetap dipertahankan, namun volumenya dikurangi seiring dengan berkurangnya penyaluran untuk publik. Sebaliknya, jumlah beras berkualitas premium/super ditingkatkan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP).

Beras multi-kualitas dapat dipertimbangkan dengan berbagai kombinasi kriteria, seperti: (i) perbedaan butir patah, yaitu 5% atau 25%, tanpa butir menir; (ii) perbedaan musim, yaitu kemarau atau musim hujan; (iii) perbedaan varietas, yaitu varietas lokal/aromatik atau varietas unggul.

Pemerintah tidak dianjurkan untuk menetapkan HPP gabah/beras yang berbeda antar-wilayah, namun tetap beras berkualitas medium. Perbedaan HPP antar daerah tidak akan mampu memecahkan masalah perbaikan kualitas beras/gabah, tetapi akan memperlemah usaha peningkatan daya saing industri padi/ beras nasional.

6.3. Implikasi

Penerapan kebijakan harga beras multi-kualitas berimplikasi terhadap:

- (i) Mendorong peningkatan volume pengadaan dalam negeri oleh BULOG yang dalam waktu yang sama dapat meningkatkan kualitas beras pengadaan dan penyalurannya, serta meningkatkan harga yang diterima produsen.
- (ii) Industri penggilingan padi akan merespon dengan memperbaiki kualitas beras yang dihasilkan, terjadi percepatan adopsi *dryers* dan mendorong modernisasi unit penggilingan padi. Dalam jangka panjang akan mempercepat perbaikan kualitas beras/gabah;
- (iii) Petani akan terangsang untuk memperbaiki kualitas gabah dengan menanam varietas terpilih.

Dorongan perbaikan kualitas beras akan lebih cepat terealisasi pada saat pemerintah memberlakukan skim kredit khusus dan insentif fiskal untuk modernisasi penggilingan padi dan perluasan adopsi teknologi panen dan pasca-panen.

VII. PENUTUP

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan para hadirin yang saya hormati.

Liberalisasi perdagangan ASEAN FTA dan ASEAN China FTA untuk komoditas beras akan segera diberlakukan, paling lambat 2018, setelah itu diikuti oleh liberalisasi perdagangan multilateral WTO. Gabah/beras yang dihasilkan oleh petani dan pengusaha penggilingan padi akan bersaing langsung dengan komoditas yang sama dari Thailand, Vietnam, Cina, Kamboja, dan Laos.

Indonesia harus menyiapkan strategi dan prioritas untuk meningkatkan daya saing komoditas gabah/beras, dan kebijakan harga sebagai salah satu instrumennya. Oleh karena itu, harga pembelian pemerintah dan pengadaan multi-kualitas beras dalam negeri oleh BULOG perlu segera dirancang. Instrumen harga ini berada dalam kendali pemerintah dan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen andalan untuk menciptakan insentif dalam rangka mendorong modernisasi penggilingan padi, mengurangi susut pada kegiatan panen dan pasca-panen.

Semoga sumbangan pemikiran ini dapat bermanfaat dalam menjawab sebagian tantangan liberalisasi perdagangan pada komoditas gabah/beras di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menitipkan ilmu dan kesehatan kepada saya, sehingga saya dapat beramal dan berkarya melalui lembaga penelitian dan lembaga pemerintah lainnya.

Bimbingan awal saya terima dari orang tua saya, Mohamad Hasan (Alm) dan Hj Sapiah yang menginginkan agar anak tunggalnya sukses dalam pendidikan, sehingga mereka bekerja keras untuk mengujudkan cita-cita mereka yang juga cita-cita saya. Suatu pengorbanan orang tua yang tiada taranya dan maha sulit untuk dibalas. Mertua saya Abdullah (Alm) dan Salamah (Alm) juga berjasa dalam mendukung karir saya di bidang penelitian.

Penghargaan tinggi juga patut diberikan ke guru-guru SR di Caleue, SMP di Kualasimpang, dan SMA di Langsa dan Sigli di Provinsi Aceh; para dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta; dosen Departement ResPac Study, the Australian National University, Canberra; dan dosen Departement of Economic, Wollongong University, Australia. Penghargaan khusus buat Prof Dr. Dannis O'Brien yang mengajak saya untuk menempuh program PhD di Wollongong University, yang kemudian bertindak sebagai pembimbing dan memperlakukan saya sebagai teman dan dibuat akrab sesama keluarga. Mereka semua telah berjasa dalam membuka pintu keilmuan, sehingga saya mampu meraih gelar tertinggi dalam ilmu ekonomi.

Peran selanjutnya adalah isteri saya, Rosna yang setia sebagai pendamping di kala susah maupun senang, terus mendukung karir saya untuk bekerja, menulis, meneliti. Juga anak-anak saya, Awullia Husein, Viona Sawitri, dan Rafli Rizki memahami kesibukan ayahnya sebagai peneliti.

Saya berhutang budi pada para ahli dari luar negeri dan dalam negeri, serta tim peneliti Studi Dinamika Pedesaan (SDP) dari Survei Agro Ekonomi (SAE) periode 1976-1982, khususnya Prof Dr. Rudolf S. Sinaga sebagai pimpinan SDP. Mereka telah membuka wawasan terhadap saya sebagai peneliti pemula dalam metoda penelitian sosial ekonomi pertanian dan perdesaan. Seterusnya peneliti di Pusat Analisis

Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian periode 1983 hingga sekarang menjadi teman dalam diskusi dan berdebat, sehingga terus terasah ketajaman dalam berfikir dan analisis.

Saya mengucapkan terima kasih terhadap Bapak Menteri Pertanian, Kepala Badan Litbang Pertanian, Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Kepala LIPI, Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Kepala P4 LIPI, TP2I Kementerian Pertanian dan LIPI, Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Saya berterima kasih atas saran-saran dari tim evaluator PSE KP: Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto, Prof. Dr. Budiman Hutabarat, Prof. Dr. Kedi Suradisastra, Prof. Dr. Pantjar Simatupang atas draf awal naskah orasi ini. Kepada tim evaluator Badan Litbang Pertanian: Prof. Dr. Made Oka Adnyana, Prof. Dr. Irsal Las, Prof. Dr. Subandriyo, Prof. Dr. Elna Karmawati, dan tim evaluator LIPI yang memberikan saran dan masukan, sehingga naskah ini dapat diselesaikan dengan standar prima, untuk itu diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Saya juga juga dibantu oleh Dr. Sahat Pasaribu, Dr. Nyak Ilham, Hermanto, S.Sos yang bersedia meluangkan waktu untuk mengedit naskah ini sehingga alur pemikirannya menjadi lebih mudah dipahami. Sdr Ibnu Salman banyak membantu dalam menyiapkan tayangan orasi sehingga lebih komunikatif.

Terima kasih semuanya.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wass. warach. wab.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Dillon HS, Sawit MH, Simatupang P, Tabor SR. 1999. Rice Policy: A Framework for the Next Millenium. Report for internal review only, prepared to BULOG: Jakarta.
- ² Sawit MH. 2001. Harga Dasar Gabah: Evaluasi 2000 dan Prospek 2001. *Majalah Pangan* 10 (36): 30-34.
- ³ Sawit MH. 2001. Kebijakan Harga: Periode Orba dan Reformasi. Suryana A, Mardianto S, editors. *Bunga Rampai Ekonomi Beras, LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*: Jakarta.
- ⁴ Puspoyo W. 2006. Peran Perum BULOG sebagai Pelaksana Kebijakan Pangan Nasional. Makalah kuliah tamu (*guest lecture*) pada 8 Juni, Sekolah Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, UGM: Yogyakarta.
- ⁵ Sawit MH. 2002. Perdagangan Beras Dunia dan Perubahan Kebijakan Beras Negara-negara Eksportir dan Indonesia. Widodo S, Hartono S, Masyhuri, Mulyo JH, editors. *Kebijakan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah. Magister Manajemen Agribisnis*, UGM: Yogyakarta.
- ⁶ Tabor SR, Sawit MH, Dillon HS. 2002. Indonesian Rice Policy and the Choice of a Trade Regime for Rice in Indonesia. Makalah disampaikan pada roundtable workshop diselenggarakan oleh INDEF (the Institute for Development of Economics and Finance) di LPEM Univ. Indonesia, 11 Maret: Jakarta.
- ⁷ Sawit MH, Djanuardi B, Partini K. 2003. New BULOG: Harmonizing Activities and Strengthening National Tasks. Euro-International: Jakarta.

- 8 Sawit HM, Pranolo T, Saefullah A, Djanuardi B, Sapuan, editors. 2002. *BULOG: Pergulatan dalam Pemantapan Peran dan Penyesuaian Kelembagaan*. IPB Press: Bogor.
- 9 Ellis F. 1993. *Indonesia Rice Marketing Study: Aggregate Rice Market dan Role of BULOG*. Indonesian Food Journal 4 (7).
- 10 Sawit MH. 2009. *Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah diterapkan di Indonesia? Analisis Kebijakan Pertanian* 7(3): 231-247.
- 11 Sawit MH. 2008. *Peran BULOG dalam Inpres Perberasan No. 3/2007: Evaluasi Kebijakan dan Implementasinya*. Majalah Pangan 17 (50): 9-29.
- 12 Sawit MH. 2009. *Respons Negara Berkembang dan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pangan Global 2007-2008*. Majalah Pangan 18 (54): 21-35.
- 13 Pingali PL, Hossain M, Gerpacio RV. 1997. *Asian Rice Bowls: The Returns Crisis?* CAB International and IRRI: Manila.
- 14 Sawit MH. 1997. *Faktor Pembatas dalam Pengembangan Sistem Usahatani Berbasis Padi*. Jurnal Sosio Ekonomika, 3(5).
- 15 Sawit MH, Manwan I. 1991. *The New Supra Insus Rice Intensification Program: The Case of the North Coast of West Java and South Sulawesi*. Bulletin of Indonesian Economic Studies 27(1): 81-103.
- 16 Sawit MH. 1989. *Penerapan Teknologi Intensifikasi Supra Insus di Jalur Pantura Jawa Barat: permasalahan yang perlu diteliti*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 8(1), Badan Litbang Pertanian: Bogor.

- 17 Suryana A, Mardianto S, editors. 2001. Bunga Rampai Ekonomi Beras. LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: Jakarta.
- 18 Mubyarto. 1970. Harga beras dan Kebijakan Produksi di Indonesia. Majalah Agro Ekonomi.
- 19 Mears LA. 1981. The New Rice Economy of Indonesia. Gadjah Mada Univ. Press: Yogyakarta.
- 20 Sawit MH. 2000. Harga Dasar Gabah 2001 dan Subsidi: Analisa Musiman. Ekonomi dan Keuangan 48 (4): 333-353.
- 21 Pearson S, Falcon W, Heyten P, Monke E, Naylor R. 1991. Rice Policy in Indonesia. Cornell Univ. Press: Ithaca.
- 22 Sapuan. 1991. Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Margin Pemasaran Beras di Indonesia. Disertasi Doktor Univ. Gadjah Mada: Yogyakarta.
- 23 Nazir M. 1977. Stabilisasi Harga Beras di Indonesia. Laporan penelitian, kerjasama Univ. Syiah Kuala dan BULOG: Jakarta.
- 24 Sawit MH, Lokollo EM. 2007. Rice Import Surge in Indonesia. Indonesian Center for Agriculture Socio-Economic and Policy Studies (ICASEPS) and The Action Aid International (AAI): Bogor.
- 25 Sawit MH. 2002. Mengganti Harga Dasar Gabah. Suara Pembaruan (opini) 12 Februari 2002.
- 26 Sawit MH. 2009. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multi-kualitas: Pengalaman Negara Lain dan Gagasan untuk Indonesia. Majalah Pangan 18 (55): 25-35.
- 27 World Bank. 2009. Indonesia Agriculture Public Spending and Growth: Policy Note Indonesia Agriculture Public Expenditure Review. Mimeo.

- 28 Simatupang P, Timmer CP. 2008. Indonesian Rice Production: Policies and Realities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 44 (1): 65-79.
- 29 Pasaribu S, Sayaka B, Sejati WK, Setyanto A, Hestina J, Situmorang J. 2007. Analisis Kebijakan Pembiayaan Sektor Pertanian. Laporan Penelitian PSE-KP, Badan Litbang Pertanian, Deptan: Bogor.
- 30 Abubakar M. 2009. World Food Price Volatility, Rice Price Stabilization and Small-scale Farmers: some recent policy responses and changes in Indonesia. Makalah dibawakan dalam diskusi panel IFAD, Roma, 18 Februari 2009.
- 31 Amang B, Sawit MH. 2001. Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi. Edisi II, IPB Press: Bogor.
- 32 Damarjati DS. 1997. Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Beras Ditinjau dari Aspek Pra dan Pasca-panen dalam Menghadapi Era Globalisasi. Silitonga C, Rachman A, editors. Pasca-panen, Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Masyarakat. Prosiding Seminar, dalam Rangka Ulang Tahun ke-30 BULOG: Jakarta.
- 33 BULOG 2006. Pedoman Umum Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri tahun 2006 di Lingkungan Perum BULOG. Perum BULOG: Jakarta.
- 34 PERPADI. 2002. Data Sekretariat/ DPP Persatuan Penggilingan dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI): Jakarta.
- 35 Munarso JS, Setyono A, Suismono, Jumali. 1998. Evaluasi Mutu dan Rendemen Beras Giling Tingkat Petani. Balai Penelitian Tanaman Padi: Sukamandi.

- 36 Nugraha US, Munarso J, Suismono, Setyono A. 1998. Tinjauan Tentang Rendemen Beras Giling dan Susut Pasca-panen. Balai Penelitian Tanaman Padi: Sukamandi.
- 37 Hasbullah R, Bantacut T. 2006. Teknologi Pengolahan Beras ke Beras. Bantacut T, Purwanto A, Hasbullah R, Halid H, Patiwi AW, editors. Peningkatan Daya Saing Beras Nasional Melalui Perbaikan Kualitas. Perum BULOG dan Fakultas Teknologi Pertanian IPB: Jakarta dan Bogor.
- 38 Patiwi AW. 2006. Teknologi Penggilingan Padi. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- 39 PADI. 2009. Usaha Penggilingan Padi Semakin Terpuruk. Majalah PADI, Edisi 21, Nop-Des 2009.
- 40 Thahir R. 2009. Revitalisasi Penggilingan Padi Melalui Inovasi Penyosohan, Mendukung Swasembada Beras dan Menghadapi Persaingan Global. Naskah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Teknologi Pengolahan Hasil. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian: Bogor.
- 41 Setyono A. 2009. Perbaikan Teknologi Pascapanen Dalam Upaya Menekan Kehilangan Hasil Padi. Naskah Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Teknologi Pertanian dan Mekanisasi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian: Bogor.
- 42 Sawit MH. 2006. Indonesia dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia. Majalah Pangan 15 (47):16-23.
- 43 Sawit MH. 2007. Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: Jakarta.

- 44 Sawit MH. 2007. Serbuan Impor Pangan dengan Minim Perlindungan di Era Liberalisasi. Wibowo R, Siregar H, dan Daryanto A, editors. *Mungkinkah Petani Sejahtera? Prosiding Konprensi Nasional PERHEPI ke XV*, PP PERHEPI: Jakarta.
- 45 Hutabarat B, Sawit MH, Purba HJ, Nuryanti S, Setyanto A, Hestina J. 2006. *Posisi Indonesia Dalam Perundingan Perdagangan Internasional di Bidang Pertanian: Analisis Skenario Modalitas*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Deptan: Bogor.
- 46 Sawit MH, Partini K, Indiarto A. 2003. Notifikasi Pertanian di WTO dan De Minimis untuk Beras. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 51(3):271-289.
- 47 Soesastro H. 2005. Indonesia's Role in ASEAN and Its Impact on US-Indonesia Economic Relationship. *Indonesian Quartely* 33 (4): 380-398.
- 48 FAO. 2009. *FAO Rice Market Monitor* 12 (1).
- 49 FAO. 2008. *FAO Rice Market Monitor* 11 (2).

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

- 1. **Sawit MH.** 2009. Praktek Subsidi Ekspor Beras di Negara Lain: Mungkinkah diterapkan di Indonesia? *Analisis Kebijakan Pertanian* 7(3): 231-247.
- 2. **Sawit MH.** 2009. HPP Multi-kualitas: Pengalaman Negara Lain dan Gagasan buat Indonesia. *Majalah Pangan*, no. 55/XVIII/September: 25-35.
- 3. **Sawit MH.** 2009. Respons Negara Berkembang dan Indonesia dalam Menghadapi Krisis Pangan Global 2007-2008. *Majalah Pangan*, no. 54/XVIII/April: 21-35.

4. **Sawit MH, Prabowo.** 2008. Alternative Framework for Agriculture Trade Negotiations: Indonesia View. Akan terbit sebagai Proceeding Conference oleh Institute for International Trade (IIT), University of Adelaide, Australia.
5. **Sawit MH.** 2008. Perum BULOG dalam Inpres Perberasan No.3/2007: Evaluasi Kebijakan dan Implementasinya. *Majalah Pangan*, no.50/XVI/Januari: 9-29.
6. **Sawit MH.** 2008. Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha: Implikasi buat Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 6(3): 199-221.
7. **Sawit MH, Lokollo EM.** 2007. *Rice Import Surge in Indonesia*. The Action Aid International in Collaboration with The ICASEPS: Bogor.
8. **Sawit MH.** 2007. *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia.
9. **Sawit MH.** 2007. Serbuan Impor Pangan dengan Minim Perlindungan di Era Liberalisasi. Dalam R Wibowo, H Siregar, A Daryanto, editors. *Mungkinkah Petani Sejahtera?* Prosiding Konpres Nasional PERHEPI ke XV, PP PERHEPI: Jakarta.
10. **Sawit MH.** 2007. Stabilisasi Harga Beras: Penentuan Harga Referensi OP dan Intervensi Pemerintah. *Majalah Pangan*, no. 49/XVI/Juli: 3-20.
11. **Sawit MH.** 2007. Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia: Resep yang Keliru. *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(3): 193-212.

12. Tabor SR, **Sawit MH**. 2006. RASKIN: A Macro Program Assessment. *Dalam* H Halid, K Partini, S Memoriska, N Ardiani, editors. *Program Bantuan Natura Raskin dan Operasi Pasar Khusus (OPK)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan BULOG: Jakarta.
13. **Sawit MH**. 2006. Transfer Pangan untuk Keluarga Miskin: Mengapa Harus Beras? *Dalam* H Halid, K Partini, S Memoriska, N Ardiani, editors. *Program Bantuan Natura Raskin dan Operasi Pasar Khusus (OPK)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan BULOG: Jakarta.
14. **Sawit MH**. 2006. Indonesia dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia. *Majalah Pangan*, no.47/XV/Jul: 16-23.
15. **Sawit MH**, N Ilham, Fathurrahman. 2005. *Membangun Pertanian Membangun Kemakmuran Bersama: Rekomendasi Buku Putih Pembangunan Pertanian*. UNSFIR/UNDP dan JAJAKI (Desember).
16. **Sawit MH**. 2005. *Perum BULOG dalam Perjanjian Pertanian WTO: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Edisi ke-2. Pusat Penelitian dan Pengembangan BULOG: Jakarta.
17. **Sawit MH**, A Setiayanto, HJ Purba dan Supriyati, 2005. Penyaringan SP (*Special Product*) Pertanian di WTO: Sebuah Modalitas dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 20 (4), Fakultas Ekonomi UGM: 383-397.
18. **Sawit MH**, B Hutabarat, A Setyanto, HJ Purba, S Nuryanti, J Hestina. 2005. Fleksibilitas Pemilihan Special Product (SP) Usulan Indonesia: Mampukah Mencapai Sasarannya? *Analisis Kebijakan Pertanian* 3 (2): 95-107.

19. **Sawit MH.** 2005. Melindungi Industri Padi/Beras: Menerapkan Tarif Kuota dan Memerankan STE. *Analisis Kebijakan Pertanian* 3(4): 298-311.
20. **Sawit MH.** 2005. “Kata Pengantar” untuk buku Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani: Menyikap Kejahatan Industri Pangan*. Penerbit Resist Book: Yogyakarta.
21. **Sawit MH.** 2004. *Agriculture Policy for the Future*, conference report, editor. Organized by Bappenas, UNDP, and FAO.
22. **Sawit MH, Prabowo.** 2004. Overview: the Direction and Roles of Agriculture Sector. *Dalam Sawit MH, editor. Proceeding Agriculture Policy for the Future*, conference report. Organized by Bappenas, UNDP, and FAO.
23. **Sawit MH.** 2004. Indonesia’ agriculture policy options for the future”. *Dalam Sawit MH, editor. Proceeding Agriculture Policy for the Future*, conference report. Organized by Bappenas, UNDP, and FAO.
24. **Sawit MH.** 2004. Besaran Stok Cadangan Beras untuk Indonesia. *Agro Ekonomi* 11 (2), Fakultas Pertanian, UGM: 1-14.
25. **Sawit MH.** 2004. Kebijakan Stok dan Reserve Beras di Negara ASEAN+3. *Majalah Pangan*, no. 42/XIII/Januari: 15-24.
26. **Sawit MH.** 2004. Akses Pasar Produk Pertanian WTO: Perkembangan Perundingan dan Arah Perubahannya. *Dalam R Wibowo, B Krisnamurthi, B Arifin, editors. Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian*, PP. PERHEPI: Jakarta.
27. **Sawit MH.** 2004. Perundingan Pertanian WTO: Antara Kepentingan Politik dan Ekonomi. *Analisis Kebijakan Pertanian* 2 (2): 119-134.

28. **Sawit MH**, Erwidodo, T Kuntohartono, H Siregar. 2004. Penyelamatan dan Penyehatan Industri Gula Nasional. *Dalam R Pambudy, S Mardianto, N Pribadi, TEH Basuki, A Suryana, editors. Ekonomi Gula: 11 Negara Pemain Utama Dunia, Kajian Komparasi dari Perspektif Indonesia*. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan: Jakarta.
29. **Sawit MH**. 2004. Penggunaan *Tiered Formula* untuk Pemotongan Tarif Bagi Produk Pertanian Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 2 (3): 244-256.
30. **Sawit MH**, B Djanuardi, K Partini. 2003. *New BULOG: Harmonizing Activities and Strengthening National Tasks*. Euro International: Jakarta.
31. **Sawit MH**, K Partini, A Indiarto. 2003. Notifikasi Pertanian di WTO dan De Minimis untuk Beras. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 51(3), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 271-289.
32. **Sawit MH**. 2003. Kebijakan Gandum/Terigu: Harus Mampu Mendorong Industri Pangan Dalam Negeri. *Analisis Kebijakan Pertanian* 1 (2): 100-109.
33. **Sawit MH**. 2003. Indonesia dalam Perjanjian Pertanian WTO: Proposal Harbinson. *Analisis Kebijakan Pertanian* 1 (1): 55-66.
34. **Sawit MH**. 2003. Pengadaan Gabah BULOG dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD). *Majalah Pangan*, no.40/XII/Januari: 34-40.
35. **Sawit MH**, T Pranolo, A Saefullah, B Djanuardi, Sapuan, editors. 2002. *BULOG: Pergulatan dalam Pemantapan Peran dan Penyesuaian Kelembagaan*. IPB Press: Bogor

36. **Sawit MH.** 2002. Penajaman Sasaran dan Program Raskin 2002: Aplikasi Metodologi Vulnerability Analysis and Mapping (VAM) di Jawa. *Majalah Pangan*, no.39/XI/Juli: 14-29.
37. **Sawit MH.** 2002. Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Sebuah Program Perlindungan Sosial. *Majalah Pangan*, no.38/XI/Januari: 10-19.
38. **Sawit MH.** 2002. Perdagangan Beras Dunia dan Perubahan Kebijakan Beras Negara-negara Eksportir dan Indonesia. *Dalam* S Widodo, S Hartono, Masyhuri, JH Mulyo, editor. *Kebijakan Pangan Nasional dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Magister Manajemen Agribisnis, UGM: Yogyakarta.
39. SR. Tabor, **MH Sawit**, HS Dillon. 2002. Indonesian Rice Policy and the Choice of a Trade Regime for Rice in Indonesia. Makalah disampaikan pada roundtable workshop diselenggarakan oleh INDEF (the Institute for Development of Economics and Finance) di LPEM Univ. Indonesia, 11 Maret: Jakarta.
40. SR. Tabor, **MH Sawit**. 2001. Social Protection via Rice: The OPK Rice Subsidy Program in Indonesia. *The Developing Economies* 39 (3): 267-294.
41. **Sawit MH.** 2001. Industri Gula Nasional di Persimpangan Jalan: Mampu Bertahan atau Tersingkir. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 16 (2), Fakultas Ekonomi UGM: 111-121.
42. B Amang dan **MH Sawit**. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pengalaman dari Orde Baru dan Era Reformasi*. Edisi ke-2. IPB Press: Bogor.
43. **Sawit MH.** 2001. Harga Dasar Gabah: Evaluasi 2000 dan Prospek 2001. *Majalah Pangan*, no.36/X/Januari: 30-34.

44. **Sawit MH.** 2001. Kebijakan Harga Beras: Periode Orba dan Reformasi. *Dalam* A Suryana, S Mardianto, editors. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: Jakarta.
45. **Sawit MH.** 2001. Kebijakan Ketahanan Pangan dalam Otonomi Daerah: Perlu Rancangan yang Sinergi. *Kebijakan Pangan dan Otonomi Daerah*. Prosiding diskusi Meja Bundar, diselenggarakan oleh PP. PERHEPI dan BULOG: Jakarta.
46. **Sawit MH.** 2000. Program OPK Beras dalam JPS Pangan: Kapan Harus Berakhir? *Ekonomi dan Keuangan* 48 (1), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 63-82.
47. **Sawit MH.** 2000. Kebijakan Ketahanan Pangan Orde Baru, Orde Reformasi dan Era Otoda: Sebuah Penilaian. *Agro Ekonomi* 8 (2), Fakultas Pertanian, UGM: 30-43.
48. **Sawit MH.** 2000. Arah Kebijakan Distribusi/Perdagangan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan: Perdagangan Dalam Negeri. *Dalam* R Wibowo, editor. *Pertanian dan Pangan: Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
49. **Sawit MH.** 2000. Harga Dasar Gabah 2001 dan Subsidi: Analisa Musiman. *Ekonomi dan Keuangan* 48 (4), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 333-353.
50. **Sawit MH.** 1999. Kebijakan Pangan Nasional: Keadaan Sekarang dan Arah ke Depan. *Agro-Ekonomika* 29 (2), PP. PERHEPI: 27-49.
51. **SR Tabor and MH Sawit.** 1999. Understanding the 1998 Food Crisis: Supply, Demand or Policy Failure?. *Dalam* P Simatupang,

- S Pasaribu, S Bahri and R Stringer, editors. *Indonesia's Economic Crisis: Effects on Agriculture and Policy Responses*. Centre for International Economic Studies, University of Adelaide.
52. SR Tabor, HS Dillon, **MH Sawit**. 1998. Food Security on the Road to Economic Recovery. *Agro-Ekonomika* 28 (2), PP PERHEPI: 1-52.
53. **Sawit MH**, P Suharno, A Rachman, editors. 1998. *Ekonomi Gula di Indonesia*. IPB Press: Bogor.
54. **Sawit MH**, B Winarso. 1998. Pemasaran Komoditas Non-Tanaman Pangan Serta Kaitannya Dengan Sistem Usaha Tani Konservasi DAS Cimanuk Bagian Hulu. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 6 (1), LIPI: 1-21.
55. **Sawit MH**, A Purwoto, M Arian. 1998. Proyeksi Permintaan Buah-buahan dan Sayur-sayuran: 1998-2003. *Ekonomi dan Keuangan* 46 (2), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 173-188.
56. **Sawit MH**. 1998. Dua Puluh Dua Tahun Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Jawa. *Agro-Ekonomika* 28 (1), PP PERHEPI: 37-56.
57. B Amang, **MH Sawit**. 1997. Perdagangan Global dan Implikasinya Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Agro-Ekonomika* 27 (2), PP. PERHEPI: 1-13
58. **Sawit MH**. 1997. Faktor Pembatas dalam Pengembangan Sistem Usahatani Berbasis Padi. *Jurnal Sosio Ekonomika*, 3(5), Fak. Pertanian Universitas Lampung.
59. **Sawit MH**. 1997. Konsumsi Sayur-sayuran dan Buah-buahan: Analisa Data SUSENAS. *Majalah Pangan* 8(31)

60. A Suryana, **MH Sawit**, C Silitonga, IW Rusastra, editors. 1997. *Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas*. Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI, PP. PERHEPI: Jakarta.
61. B Amang, **MH Sawit**, A Rachman, editors. 1996. *Ekonomi Kedelai di Indonesia*. IPB Press: Bogor.
62. BR Prawiradiputra, F Agus, **MH Sawit**, AN Gintings, editors. 1996. *Analisis Penelolaan Daerah Aliran Sungai*. Prosiding lokakarya Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Puslit Tanah dan Agroklimat: Bogor.
63. N Uphoff, **MH Sawit**. 1996. Pendekatan Partisipasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *Dalam* BR Prawiradiputra, F Agus, MH Sawit, AN Gintings, editors. *Analisis Penelolaan Daerah Aliran Sungai*. Prosiding lokakarya Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Puslit Tanah dan Agroklimat: Bogor.
64. **Sawit MH**, NL Nurida, B Winarso. 1996. Peran Pertanian dalam Ekonomi Rumah Tangga Petani Lahan Kering: Kasus DAS Cimanuk Bagian Hulu. *Dalam* BR Prawiradiputra, F Agus, MH Sawit, dan AN Gintings, editors. *Analisis Penelolaan Daerah Aliran Sungai*. Prosiding lokakarya Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Puslit Tanah dan Agroklimat: Bogor.
65. **Sawit MH**, F Sulaiman, S Mardianto, Suyanto, editors. 1995. *Methodologi Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam Alternatif Sistem Tebas Bakar*, Prosiding Lokarya, diterbitkan oleh proyek Alternatives to Slash and Burn. ICRAF dan Puslit Sosial Ekonomi Pertanian: Bogor.

66. **Sawit MH.** 1995. Metoda RRA: Persyaratan dan Aplikasinya. *Dalam* MH Sawit, F Sulaiman, S Mardianto, Suyanto, editors. *Methodologi Paricipatory Rural Appraisal (PRA) dalam Alternatif Sistem Tebas Bakar*, Prosiding Lokarya, diterbitkan oleh proyek Alternatives to Slash and Burn. ICRAF dan Puslit Sosial Ekonomi Pertanian: Bogor.
67. **M.M Metwally.** 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam* (diterjemahkan dan kata pengantar **MH Sawit**). PT INSANA: Jakarta.
68. **Sawit MH, D O'Brien.** 1995. Farm Household Response on the Government Policies: Evidence from West Java. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 31 (2), Australian National University: 41-59.
69. **Sawit MH.** 1994. Strategi Peningkatan SDM dan Produktivitas dalam Rangka Pembangunan Pertanian. *Dalam* MH Sawit, editor. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Prosiding Lokakarya, diterbitkan oleh PP.PERHEPI: Jakarta.
70. **Sawit MH, SM Pasaribu, A Djauhari, Sumaryanto, editors.** 1994. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Pertanian*. Prosiding workshop nasional, diterbitkan oleh PP PERHEPI: Jakarta.
71. **Sawit MH.** 1994. Analisa Permintaan Pangan: Bukti Empiris Model Rumah Tangga Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi* 13 (2): 49-71.
72. **Sawit MH, I Manwan.** 1991. The New Supra Insus Rice Intensification Program: The Case of the North Coast of West Java and South Sulawesi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 27(1), Australian National University: 81-103.

73. S Adiwigeno, **MH Sawit**. 1990. Pengembangan Teknologi dalam Mendukung Diversifikasi Pertanian. *Dalam* A Suryana, A Pakpahan, A Djauhari, editors. *Diversifikasi Pertanian: dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*. Pustaka Sinar Harapan dan PP PERHEPI: Jakarta.
74. **Sawit MH**, A Saefuddin. 1988. Pendekatan Agro-Ekosistem dalam Penelitian Sistem Usahatani. *Dalam* M Syam, M Sabrani, A Musaddad, editors. *Sistem Usahatani di Lima Agro-Ekosistem*. Risalah Lokakarya Penelitian Sistem Usahatani. Puslitbang Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian: Bogor.
75. **Sawit MH**. 1989. Penerapan Teknologi Intensifikasi Supra Insus di Jalur Pantura Jawa Barat: permasalahan yang perlu diteliti. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 8(1), Badan Litbang Pertanian.
76. **Sawit MH**. 1988. Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: dilemma milik bersama. *Masyarakat Indonesia*, (Jilid XV) LIPI: 67-87.
77. I Manwan, K Suryanata, DS McCauley, **MH Sawit**. 1988. KEPAS Study on An Agro-Ecosystems Approach to Dealing with Diversity in the Uplands of East Java: Summary and Conclusions. *Pendekatan Agroekosistem pada Pola Pertanian Lahan Kering di Jawa Timur*. AARD and the Ford Foundation.
78. **Sawit MH**, B Santoso, M Yusron. 1998. Status dan Kecendrungan Perubahan Agro-Ekosistem Lahan Kering. *Dalam* I Manwan, K Suryanata, DS McCauley, **MH Sawit**, editors. *Pendekatan Agroekosistem pada Pola Pertanian Lahan Kering di Jawa Timur*. AARD and the Ford Foundation.

79. **Sawit MH**, A Saefudin, I Manwan. 1988. Program Supra Insus di Jalur Pantura Jabar dan Sulsel: Masalah, kendala dan saran perbaikannya. *Dalam* risalah simposium II *Penelitian Tanaman Pangan* (Buku II). Puslitbang Tanaman Pangan: Bogor.
80. K Suryanata, **MH Sawit**, KC Chong. 1987. Propek dan Masalah Usaha Pengembangan Tambak di Pantai Utara Pulau Jawa. *Dalam* prosiding workshop *Pengelolaan dan Pola Perubahan Kawasan*. KEPAS disponsori oleh the Ford Foundation.
81. **Sawit MH**, ES Heruwati, Sastrawijaya. 1987. Propek dan Kendala Industri Pengolahan Ikan Tradisional di Pantai Utara Pulau Jawa. *Dalam* prosiding workshop *Pengelolaan dan Pola Perubahan Kawasan*. KEPAS, disponsori oleh the Ford Foundation.
82. **Sawit MH**. 1987. Segmentasi dalam Pasar Tenaga Kerja: kasus buruh Tani di daerah dataran rendah pulau Jawa. *Masyarakat Indonesia* 14 (1), LIPI.
83. D Mazumdar, **MH Sawit**. 1986. Trends in Rural Wages, West Java: 1977-83. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 22 (3), Australian National University: 93-105.
84. **Sawit MH**. 1986. Upah Buruh tidak Terdidik di Pedesaan DAS Cimanuk: 1977-1983. *Ekonomi dan Keuangan* 34 (2), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 197-209
85. **Sawit MH**. 1986. Perubahan Kesempatan Kerja dan Tingkat Upah Pedesaan Jawa: Implikasi untuk Sektor Pertanian. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 5(2), Badan Litbang Pertanian.

86. **Sawit MH.** 1985. Status Penguasaan Tanah di Usahatani Padi dan Implikasi Ekonominya: studi di pedesaan Jawa Barat. *Ekonomi dan Keuangan* 33 (1), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 29-46.
87. **Sawit MH, Y Saefudin, S Hartoyo.** 1985. Aktivitas Non-pertanian, Pola Musiman dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga di pedesaan Jawa. *Dalam Mubyarto, editor. Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan.* BPFE dan P3PK, UGM: Yogyakarta.
88. **Sawit MH.** 1985. Fungsi Respons dan Fungsi Permintaan Tenaga Kerja: Analisa Jangka pendek untuk Tanaman Padi di Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi* 4(1): 1-10.
89. **Sawit MH, R Nurmanaf.** 1980. Pertumbuhan dan Pemerataan: Kasus Perubahan Bagian untuk Pemilik Tanah dan Buruh Tani di Pedesaan Jawa Barat 1969 and 1979. *Ekonomi dan Keuangan* 28(4), LPEM Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia: 383-403.
90. **Sawit MH. Y Saefuddin.** 1980. Belajar dari Kebijakan Traktorisasi di Jawa Barat: kasus DAS Cimanuk. *PRISMA*, no.6, LP3ES: 75-82.
91. **Sawit MH.** 1979. Masa Depan Kerajinan Rakyat: Kasus DAS Cimanuk. *PRISMA*, no.3, LP3ES.

KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PEMBICARA/ MENGHADIRI PERTEMUAN ILMIAH/ KEYNOTE SPEAKER

1. Pembicara pada *Food Security, Bio Fuels and Food Price Inflation: Policy Conflicts and Structural Reforms*, diselenggarakan oleh The Australian APEC Study Centre, di Melbourne, **Australia**, tgl 20 Juni 2009.

2. Menghadiri pertemuan *Food Price Volatility: How to Help Smallholder Farmers Manage Risk and Uncertainty*, di Roma, **Italia**, tgl 18-19 Februari 2009, diselenggarakan oleh UN IFAD (International Fund and Agriculture Development).
3. Pembicara pada seminar *International Conference on Viability of Alternative Frameworks for Agricultural Trade Liberalisation*, di Adelaide, **Australia**, tgl 11-12 December 2008, diselenggarakan oleh Institute for International Trade (IIT), University of Adelaide.
4. Pembicara pada Seminar tentang *Dealing with Food Price Inflation: Policy Responses to Protec the Poor in the Short and Long Run*, di Manila, **Filipina** tgl 7-8 Oktober 2008, diselenggarakan oleh UN ESCAP.
5. Menghadiri pada Dialogue on Tropical Products, Trade, Natural Resources Management and Poverty, organized by the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and the Institute for International Trade Negotiations (ICONE), 3-5 December 2007, Salvador (Bahia), **Brazil**.
6. Pembicara pada Discussion on Import Surge under Agriculture in the WTO Negotiations, organized by Action Aid International, at WMO, Geneva, **Switzerland** 7 June 2007.
7. Pembicara dalam Authors Meeting on SP-SSM Case Studies for Identification and Designation of Special Products, organized by ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), at WMO, Geneva **Switzerland**, 19 January 2007.
8. Pembicara pada Seminar on The South and East Asian Strategic Dialogue on Rural Development, Agriculture and Trade, organized by ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), Hanoi **Vietnam**, 8-9 March 2007.

9. Menghadiri dalam Discussion on the Exploring Options from Making Progress on the WTO Market Access and Domestic Support Pillars, organized by ICTSD(International Centre for Trade and Sustainable Development), at Victoria Hotel, Glion, **Switzerland**, 21-23 January 2007.
10. Pembicara pada Workshop on the Impact of Agriculture Product Import Surge in Developing Countries, organized by Action Aid International, at Panafric Hotel, Nairobi, **Kenya**, 19-20 October 2006.
11. Pembicara Second Stakeholder Consultation on Trade and Human Development, organized by UNDP, New Delhi, **India**, 1-3 June 2005.
12. Pembicara pada International Trade and Human Development Conference organized by UNDP and TWN (third world network), Penang **Malaysia**, 21-24 November 2004.
13. 13 Pembicara pada Technical Meeting on Rice Reserve System in Bangkok, **Thailand** (First Meeting on 19-20 April 2002, and Second Meeting on 21-23 August 2002).
14. Anggota DELRI pada Formal and Informal Session on the Committee on Agriculture WTO, Geneva, **Switzerland** (November 2000, June 2002 and July 2002; February 2003 and March 2003, July and September 2004; January and February 2006, 2007-2008).
15. Anggota DELRI pada World Food Summit Conference, Rome, **Italy** (June and November 2001).
16. Pembicara pada Seminar on Agribusiness Indonesia 2000, organized by IBC Asia Limited Singapore, **Denpasar Bali**, 22-23 June 2000.

17. Menghadiri Seminar on NGO Forum of Food Importing Countries On the Next WTO Agricultural Negotiation, Seoul, **South Korea**, 26 October 1999.
18. Menghadiri Seminar on Food Aspect of APEC member countries in Tokyo, **Japan**, 13 March 1999.
19. Pembicara pada Consultative Meeting on Food Infrastructure for Task Force on Food APEC, Tokyo 13 March 1998; and Workshop on Agriculture Finance in APEC member countries, Tsukuba, **Japan**, 16-17 March 1998.
20. Anggota DELRI pada APEC: second SOM for the 9th APEC Ministerial Meeting, 12 May - 20 May 1997, Quebec City, **Canada** and Task Force on Food of APEC in St. Johns, Newfoundland, **Canada**, 31 August 1997.
21. Menghadiri pada The Second Conference of The Asian Society of Agricultural Economist (ASAE) Conference, **Denpasar Bali**, Indonesia, 6-9 August 1996.
22. Menghadiri Regional Seminar on Improving Technical Efficiency for Food Marketing, organized by FOA/AFMA, in Beijing, **China**, 2-5 September 1996.
23. Mengikuti Workshop on the Integrated Watershed Analysis and Management, sponsored by Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), Cornell University, Ithaca, New York: 25 September-15 October 1994, **USA**.
24. Pembawa Makalah pada The Annual Conference of the Australian Agricultural Economic Society, University of New England (1991); University of Sydney (1993). The Economist Conference di University of Tasmania (1992), dan Murdoch University WA (1993), **Australia**.

DAFTAR TULISAN DI MEDIA LAIN

1. **M. Husein Sawit**, 2009. "Misteri Penurunan Angka Susut Gabah Tahap Panen/Pasca-panen", *Warta Intra Bulog* (Artikel), Edisi 08-09 (36).
2. **M. Husein Sawit**, 2009. "Ramalan Harga Beras Eceran di Kota-Kota Besar dan Indonesia: Periode Juni 2009-Februari 2010, *Warta Intra Bulog* (Artikel), Edisi 5 (36).
3. **M. Husein Sawit**, 2009. "Stabilisasi Harga Pangan Pokok di Era Krisis Pangan: Apa yang Kita Kerjakan dan Bagaimana Negera Lain Melakukannya", *Warta Intra Bulog* (Artikel), Edisi 2 (35).
4. **M. Husein Sawit**, 2008. "Krisis Beras Global 2008: Sebuah Pelajaran", *Warta Intra Bulog* (Artikel), Edisi khusus akhir tahun 2008.
5. **M. Husein Sawit**, 2008. "Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB): Tantangan dan Peluang Bulog", *Warta Intra Bulog* (Artikel), Edisi 5 (36).
6. **M. Husein Sawit**, 2007. "OP Beras: Mampukah Menurunkan Harga?" *Gatra* (Kolom), 28 Februari 2007
7. **M. Husein Sawit**, 2007. "Ramalan Harga Gabah dan Beras Semester II 2007: Implikasi Pengadaan dan OP 2007", *Warta Intra Bulog* (Artikel), Juni 2007.
8. **M. Husein Sawit**, 2007. "Bahaya Liberalisasi Pangan", *Tani Merdeka* (Kolom), Juli 2007.
9. **M. Husein Sawit**, 2007. "Stabilisasi Harga Beras", *Gatra* (Kolom), 27 September 2007.

10. **M. Husein Sawit**, 2006. “Delapan Dilema Kebijakan Beras”, *Gatra* (Kolom), 20 September 2006.
11. **M. Husein Sawit**, 2005. “Inpres Beras: Harapan Baru, Tujuan Lama”, *Gatra* (Kolom), 2 April 2005.
12. **M. Husein Sawit**, 2005. “Perangkap Impor Pangan”, *Gatra* (Kolom), 30 April 2005.
13. **M. Husein Sawit**, 2005. “Pelarangan Impor Beras dan Forecast Harga Beras Eceran Akhir tahun 2005”, *Warta Intra Bulog* (Artikel), Juli 2005.
14. **M. Husein Sawit**, 2005. “Kebijakan Perberasan: Bukan Obat Panadol”, *Warta Intra Bulog* (Artikel), April 2005.
15. **M. Husein Sawit**, 2005. “Konvergensi G33”, *Gatra* (Kolom), 2 Juli 2005.
16. **M. Husein Sawit**, 2005. “Harmonisasi Tugas Publik vs Komersialisasi Bulog”, *Warta Intra Bulog* (Artikel), September 2005.
17. **M. Husein Sawit**, 2005. “Memihak Petani”, *Gatra* (Kolom), 10 September 2005.
18. **M. Husein Sawit**, 2005. “Demokratisasi Pembangunan Pertanian”, *Gatra* (Kolom), 20 Oktober 2005.
19. **M. Husein Sawit**, 2004. “Kesepakatan Baru WTO”, *Gatra* (Kolom), 14 April 2004.
20. **M. Husein Sawit**, 2004. “Efektivitas Program Raskin di Tengah Larangan Impor Beras”, *Bisnis Indonesia* (Opini), 27 Januari 2004.
21. **M. Husein Sawit**, 2004. “Pecahkan Raskin Mulai dari Titik Distribusi”, *Bisnis Indonesia* (Opini), 28 Januari 2004.

22. **M. Husein Sawit**, 2003. "Produk Strategis: Perjuangan Akhir Indonesia di WTO", *Medium* (Kolom), 12 Maret 2003.
23. **M. Husein Sawit**, 2003. "WTO dan Nasib Negara Miskin", *Medium* (Artikel), 5 April 2003.
24. **M. Husein Sawit**, 2003. "Ilusi Keseimbangan Baru di Cancun", *Medium* (Kolom), 27 Agustus 2003.
25. **M. Husein Sawit**, 2003. "Inpres Harga Beras: Minimum Dukungan", *Bisnis Indonesia* (Opini), 29-30 Januari 2003.
26. **M. Husein Sawit**, 2002. "Beras Naik, Mengapa Panik", *Gamma* (Kolom), 20 Januari 2002.
27. **M. Husein Sawit**, 2002. "Mengganti Harga Dasar Gabah", *Suara Pembaruan* (Opini), 12 Februari 2002.
28. **M. Husein Sawit**, 2002. "Mengontrol atau Mengelola Impor Beras", *Suara Pembaruan* (Opini), 26 Februari 2002.
29. **M. Husein Sawit**, 2002. "Situasi Beras 2002: Banjir dan Risiko El Nino", *Gamma* (Kolom), 22 April 2002.
30. **M. Husein Sawit**, 2002. "Kuota Tarif: Opsi Baru Pengelolaan Impor Beras", *Gamma* (Kolom), 20 Mei 2002.
31. **M. Husein Sawit**, 2002. "Presiden Megawati dan KTT Pangan di Roma", *Suara Pembaruan* (Opini), 18 Juni 2002.
32. **M. Husein Sawit**, 2001. "Politik Beras Amerika Serikat", *Gamma* (Kolom), 26 Juni 2001.
33. **M. Husein Sawit**, 2001. "Kiat Mengangkat Kaum Duafa", *Gamma* (Kolom), 10 Juli 2001.
34. **M. Husein Sawit**, 2001. "Masih Perlukah STE Beras", *Gamma* (Kolom), 7 Agustus 2001

35. **M. Husein Sawit**, 2001. “Hak untuk Pangan”, *Gamma* (Kolom), 22 Oktober 2001.
36. **M. Husein Sawit**, 2001. “*CGI dan Beras*”, *Gamma* (Kolom), 27 Nopember 2001.
37. **M. Husein Sawit**, 2000. “Komoditas Beras: Bela Petani atau Konsumen”, *Gatra* (Kolom), 29 Januari 2000
38. **M. Husein Sawit**, 2000. “Harga Dasar Gabah: Kebijakan Setengah Hati”, *Gatra* (Kolom), 1 April 2000.
39. **M. Husein Sawit**, 2000. “Menggugat Kebijakan Perberasan”, *Komoditas* (Kolom), 9 April 2000.
40. **M. Husein Sawit**, 2000. “Petani Era Millenium”, *Komoditas* (Kolom), 10 Mei 2000.
41. **M. Husein Sawit**, 1998. “Harga Beras di Dalam Negeri dan di Luar Negeri”, *Republika* (Opini), 26 Juni 1998.
42. **M. Husein Sawit**, 1998. “Risiko Ketahanan Pangan dalam Masa Krisis”, *Republika* (Opini), 20 Juli 1998.
43. **M. Husein Sawit**, 1998. “Produksi Padi dan Pengadaan Beras Dalam Negeri”, *Kompas* (Opini), 13 Juni 1998.
44. **M. Husein Sawit**, 1998. “Mencermati Penurunan Produksi Beras tahun 1998”, *Republika* (Opini), 29 Agustus 1998.

EDITOR JURNAL/MAJALAH/ PROSIDING

- 2007-2008 Editor luar/lepas yang terkait dengan Kebijakan Beras Nasional dan Global untuk *Journal Agricultural Economics* (JAGECON), Perdue University, AS (2007); *Bulletin Indonesian Economic Studies* (BIES), Australian National University (2007); publikasi *International Centre for Trade and Sustainable Development* (ICTSD), Geneva (2008).
- 2005-sekarang Ketua dan Anggota editor *e-Jurnal Ekonomi Rakyat*, Yayasan Agro Ekonomi.
- 1999-sekarang Anggota editor *Journal Agro Ekonomi*, Universitas Gadjah Mada.
- 1996- sekarang Anggota editor *Journal Sosio Ekonomika*, Universitas Lampung.
- 1996- sekarang Anggota editor *Majalah Pangan*, Puslitbang BULOG
- 1997-2000 Anggota editor *Majalah Agro Ekonomika*, PP PERHEPI.
- 1987-1989, dan 1996-2000 Anggota editor *Journal Agro Ekonomi*, Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan Pertanian.
- 1990-2008 Prosiding (sebagai anggota/ketua) pada sejumlah publikasi di Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Agroklimat, Puslit Agro Ekonomi, PP PERHEPI, dan Puslitbang BULOG

PEMBINAAN KADER ILMIAH

- 1998- 2009 Membimbing Thesis/Disertasi dan/atau Penguji Luar Komisi untuk Mahasiswa S2 dan S3 di Sekolah/ Program Pasca Sarjana IPB, UGM, dan UNPAD.
- 2000-2003 Mengajar Manajemen Kuantitatif di Program MM STIE, Budi Luhur, Gedung Arthaloka, Jakarta.
- 1976-1982 Mengajar Teori Ekonomi (Mikro dan Makro) di Fakultas Ekonomi, UIKA Bogor.

AKTIVITAS DI ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

- 2004-2010 Penasehat Senior/Tenaga Ahli untuk kegiatan PSO (*Public Service Obligation*) di BULOG.
- 2009 Narasumber Tim Koordinasi Kebijakan Stok dan Diversifikasi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian).
- 2007-2010 Narasumber Tim Koordinasi Kebijakan Perberasan, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian).
- 2008 Penasehat Senior/Tenaga Ahli bidang Pangan dan Perdagangan di KADIN (Kamar Dagang Indonesia).
- 2006 Narasumber pada Tim Monitoring Implementasi Inpres Perberasan No.13/2005 tentang Kebijakan Perberasan di Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI.

- 2003 Salah seorang anggota Tim yang dibentuk UGM dan BULOG dalam merancang Stok Beras Nasional. Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah menetapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sejak 2005.
- 2001-2003 Turut serta dalam pembahasan tahap awal Emergency Rice Reserve (ERR) di ASEAN+3. Dalam waktu dekat akan diadopsi oleh masing-masing negara anggota ASEAN+3.
- 2003-2005 Senior Advisor on Agriculture Policy at UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery), UNDP Jakarta.
- 2003 Ketua tim Review Kebijakan dan Formulasi Industri Gula Indonesia, tugas khusus Menteri Pertanian.
- 2000-2008 Menjadi anggota DELRI untuk berbagai perundingan bidang Pertanian WTO, Jenewa.
- 2004-2008 Anggota Tim WTO di Departemen Pertanian.
- 2005-2008 Anggota Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (PI) yang diketuai oleh Menteri Perdagangan.
- 2004-2008 Anggota SATGAS G-33 WTO yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan RI.
- 2003 Senior Agricultural Economist pada proyek penelitian The Impacts Agreement on Agriculture of WTO on Economic, Social and Environment in Indonesia: the Case of the Rice Sector, dibiayai oleh UNEP (United Nations Environment Programmed).

- 2002 Senior Research Fellow di Universitas Kyoto, Japan (September-November 2002), disponsori oleh Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).
- 2000-2003 Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga BULOG
- 2001 Anggota Tim Kebijakan Beras, yang dibentuk oleh Bappenas dan Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian).
- 1999 Tercantum dalam buku: *Apa dan Siapa Sejumlah Alumni UGM*, Pustaka LP3ES: Jakarta
- 1995-1999 Anggota Tim Ahli Kepala BULOG, bidang Kebijakan Makro dan Pangan.
- 1999-2000 Staf Ahli Menteri Pangan dan Hortikultura, bidang Perdagangan dan Pemasaran Pangan.
- 1995- 2001 Anggota Tim Evaluasi Peneliti pada Badan Litbang Pertanian.
- 1998-2001 Tenaga Pengajar untuk Metoda Kuantitatif untuk Bisnis dan Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Budi Luhur, Jakarta.
- 1998 Konsultan WFP (World Food Program UN) for Food Aid Management for Indonesia.
- 1995 FAO local consultant untuk ADB Second National Estate Crop Project Rapid Rural Appraisal (RRA) an assessment of the existing IPM programmed in Indonesia and identify constraints to estate crop production and the adoption of IPM by smallholders.

- 1994-1995 Peneliti senior lintas disiplin untuk proyek the Alternative Slash and Burns (ASB) project in Indonesia, disponsori oleh International Centre for Research on Agro Forestry (ICRAF).
- 1994-1997 Peneliti senior lintas disiplin untuk the Upland Research and Technology Development for the National Watershed and Conservation Project, disponsori oleh World Bank.
- 1993 Research fellow, Department of Economics, Research School of Pacific Study, Australian National University, Australia.
- 1994-1995 Mengorganisir dan melaksanakan Pelatihan tentang RRA methodology, dibiayai oleh the Ford Foundation, USAID, the Government of Indonesia (1985-1989). Juga mengorganisir dan melaksanakan pelatihan tentang PRA methodology disponsori oleh Centre for Research on Agro Forestry/ICRAF (1994-1995).
- 1996-2000 Salah seorang sekretaris Pengurus Pusat (PP)
dan PERHEPI, dan kemudian menjadi kepala bidang
2004-2007 Kerjasama dan Hubungan Internasional PP
PERHEPI.
- 2006-sekarang Wakil Ketua Yayasan Agro Ekonomika (YAE).
Sebelumnya, sejak 2003 sebagai anggota pengurus
YAE.
- 2007-sekarang Pengurus Pusat Dewan Beras Nasional (DBN) dan
Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP LENGKAP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Mohamad Husein Sawit
2. Tempat/Tgl Lahir : Sigli/25 Nopember 1947
3. Anak : Tunggal
4. Nama ayah kandung : Mohamad Hasan
5. Nama ibu kandung : Hj. Sapiah
6. Nama isteri : Rosna Abdullah
7. Jumlah putra/putri : 3
8. Nama putra/putri:
 1. Awullia Husein
 2. Viona Sawitri
 3. Rafli Rizki
9. No.SK APU tgl disahkan oleh Presiden terhitung mulai tanggal : No.75/M tahun 2006/ TMT 1 Juni 2005
10. No.SK Jabatan/ Golongan IV/e oleh Presiden RI disahkan oleh Presiden : No.48/K tahun 2008/TMT 1 April 2008
11. Judul Orasi : Reformasi Kebijakan Harga Produsen dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Beras
12. Bidang orasi (sesuai dengan Kepres APU) : Ekonomi Pertanian

B. Pendidikan Formal

1	SR/SD	SR	Caleue/Sigli	1960
2	SLP/SMP	SMP	Kualasimpang	1963
3	SLTA/SMA	SMA	Sigli	1966
4	S.1	FE/UGM	Yogyakarta	1974
5	S.2	Australian National University	Canberra, Australia	1984
6	S.3	Univ. of Wollongong	Wollongong, Australia	1994

Pendidikan Informal (Kursus/Training) yang sesuai dengan kompetensi

Tahun	Training/kursus	Tempat/Kota
1985	Analisis Rural Labor Market	World Bank/ Washington DC, AS
1994	Watershed Analysis and Resource Management	Cornell University/ Ithaca, AS

C. Jabatan Struktural

No.	Tahun	Nama Jabatan	Nama Instansi
1	1984-1988	Kepala Sub-Bidang Monitoring	Puslit Agro-Ekonomi
2	1994-1995	Kepala Sub-Bidang Rencana Kerja	Puslit Sosial Ekonomi Pertanian

3	1999-2000	Staf Ahli Menteri bidang Pemasaran dan Perdagangan Pangan	Kementerian Negara Pangan dan Hortikultura
4	2000-2003	Direktur Kerjasama Internasional dan Hubungan Antar Lembaga	BULOG

D. Jabatan Fungsional Peneliti

No.	Jenjang Jabatan	Tahun Pengangkatan
1	Peneliti Muda	1989
2	Peneliti Madya	1993
3	Ahli Peneliti Muda	1997
4	Ahli Peneliti Madya	2003
5.	Ahli Peneliti Utama	2005

E. Publikasi Ilmiah

No.	Kualifikasi	Jumlah
1	Sebagai Penulis Tunggal	60
2	Penulis bersama	31
	Total	91

No.	Bahasa	Jumlah
1	Publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia	77
2	Publikasi ilmiah dalam bahasa Inggris	14
	Total	91

F. Pembinaan Kader Ilmiah

No.	Nama PT tempat mengajar	Tahun
1	Fakultas Ekonomi UIKA Bogor	1976-1982
2	Program MM STIE Budi Luhur	2000-2003
No.	Nama PT tempat membimbing thesis S2	Tahun
1	IPB	1999-2000
No.	Nama PT tempat membimbing disertasi S3	Tahun
1	UNPAD	1997-2000 & 2009-2010
2	IPB	1997-2000 & 2008-2010

G. Organisasi Profesi

No.	Nama Organisasi	Jabatan
1	PP PERHEPI	Sekretaris Pusat/Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional
2	Yayasan Agro Ekonomika	Wakil Ketua
3	Dewan Beras Nasional	Ketua Bidang Riset
4	Masyarakat Agribisnis Indonesia	Ketua Bidang Hubungan Internasional

H. Tanda Penghargaan

Tahun Perolehan	Nama/Jenis penghargaan	Penjabat/instansi yang memberikan
1999	Satyalancana Karya Satya 20 tahun	Kementerian Negara Pangan dan Hortikultura

ISBN: 978-979-3566-82-5

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian

Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
www.litbang.deptan.go.id